



## INTERPRESTASI TIPOLOGI DESA RAMAH PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri, Kabupaten Seluma)

**Abdul Aziz Zuhakim**

*Universitas Bengkulu*

abdul.azizzuhakim@unib.ac.id

Artikel info:

Submitted: 27-05-2024; Review: 18-06-2024; Accepted: 30-06-2024

### **Abstract**

*The Village SDGs represent a crucial instrument for ensuring sustainable village development, including the context of women as development subjects in the village. This research project aims to interpret the typology of women-friendly villages through the fulfillment of Village SDG Indicator Number 5 in Cahaya Negeri Village, Sukaraja Subdistrict, Seluma Regency. The research method employed is a descriptive qualitative approach, with data collection conducted through in-depth interviews with key informants who possess knowledge and experience as development actors in Cahaya Negeri Village, and the review of pertinent documents, including regulations and official documents. The data were subjected to a content analysis to identify the principal themes, patterns, and meanings that emerged from the data set. The findings of the study indicate that Cahaya Negeri Village continues to encounter obstacles in attaining SDG indicator number 5, including the low representation of women in Village Consultative Body (BPD) institutions and the low gross enrolment rate (APK) of women in education at the SMA/SMK/MA level. Nevertheless, this study has also identified significant potential for enhancing women's participation through the introduction of gender-responsive village regulations and more inclusive empowerment programmes. The recommendations presented in this paper are intended to assist stakeholders in integrating women as key actors in the process of village development*

**Keywords:** *Women-Friendly Village; Village SDGs; Village Development*

### **Abstrak**

SDGs Desa merupakan salah satu instrument penting di dalam memastikan pembangunan desa yang mengacu pada agenda keberlanjutan program, termasuk konteks perempuan sebagai subyek pembangunan di desa menjadi penting. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan tipologi Desa Ramah Perempuan melalui pemenuhan indikator SDGs Desa Nomor 5 di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai pelaku pembangunan di Desa Cahaya Negeri, serta melakukan telaah dokumen yang relevan seperti peraturan dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi untuk mengidentifikasi tema utama, pola, dan makna yang muncul dari data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Desa Cahaya Negeri masih menghadapi tantangan dalam memenuhi indikator-indikator SDGs nomor 5, seperti rendahnya partisipasi perempuan di dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan rendahnya angka partisipasi kasar (APK) perempuan dalam pendidikan tingkat SMA/SMK/MA. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya potensi besar untuk meningkatkan keterlibatan perempuan melalui peraturan desa yang lebih responsif gender dan program-program pemberdayaan yang lebih inklusif. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam mengakomodir perempuan sebagai aktor penting di dalam pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Desa Ramah Perempuan; SDGs Desa; Pembangunan Desa

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang semakin terintegrasi, upaya menuju pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda utama bagi banyak negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran kunci dalam menetapkan arah dan target untuk pembangunan global yang inklusif, berkelanjutan, dan berdasarkan prinsip keadilan sosial. Mengadopsikan agenda 2030 pada tahun 2015, dunia telah berkomitmen untuk mencapai 17 SDGs yang saling terkait, meliputi bidang-bidang seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan.

Urgensi menangani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam konteks desa digarisbawahi oleh berbagai tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian terdahulu. (Yefni et al., 2024) menyoroti bahwa pemerintahan lokal dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk implementasi SDGs yang efektif, namun banyak desa menghadapi hambatan yang signifikan seperti sumber daya yang terbatas dan kurangnya kesadaran tentang SDGs. (Subekti, 2024) menekankan perlunya strategi khusus yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi lokal, karena pendekatan satu ukuran yang cocok untuk semua sering gagal beresonansi dengan realitas desa. Selain itu, (Mashur, 2022) menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan sering diabaikan, yang mengarah pada praktik yang tidak berkelanjutan yang membahayakan pembangunan jangka panjang. Penelitian (Alkadafi, 2022) menunjukkan bahwa mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan praktik modern dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dan mempromosikan pencapaian SDGs. Terakhir, (Mustakimah et al., 2023a) menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan kapasitas untuk memberdayakan penduduk lokal, yang penting untuk menumbuhkan budaya keberlanjutan. Secara kolektif, studi ini menggambarkan bahwa intervensi spesifik konteks yang mendesak diperlukan untuk memajukan SDGs Desa secara efektif.

Berangkat dari beberapa sudut pandang penelitian terdahulu, maka dapat dipahami bahwa implementasi dari SDGs Desa merupakan fokus yang semakin berpengaruh dalam diskursus pembangunan kontemporer. Studi-studi terkini mengungkapkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh entitas pedesaan dalam mengadopsi dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip SDGs. Seperti penelitian Yefni et al menekankan keharusan didalam tata kelola lokal dan partisipasi komunal sebagai elemen krusial dalam efektivitas implementasi SDGs, namun mengidentifikasi kendala substansial berupa keterbatasan sumber daya dan defisiensi kesadaran publik terhadap konsep SDGs. Selanjutnya Subekti menggarisbawahi kebutuhan akan strategi yang terkalibrasi dengan kondisi sosio-ekonomi lokal, mengingat inefektivitas pendekatan yang bersifat generik dalam merespon realitas pedesaan yang beragam. Lain halnya dengan penelitian Mashur, yang mengekspos tendensi pengabaian aspek keberlanjutan ekologis, yang berpotensi mengakibatkan praktik-praktik *non-sustainable* yang kontraproduktif terhadap pembangunan jangka panjang.

Sedangkan dalam konteks tulisan ini, interpretasi dari 'Tipologi Desa Ramah Perempuan' menjadi sangat relevan, mengingat interkoneksi antara pencapaian SDGs dan pemberdayaan gender di lingkungan pedesaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Alkadafi mengemukakan potensi sinergi antara kearifan lokal dan metodologi kontemporer dalam meningkatkan resiliensi komunitas, ini adalah suatu pendekatan yang dapat diaplikasikan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi dan pemberdayaan perempuan. Tulisan Mustakimah et al menekankan urgensi edukasi dan pengembangan kapasitas sebagai katalis dalam membangun kultur keberlanjutan, yang juga merupakan komponen integral dalam membentuk desa yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan.

Berangkat dari perspektif beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diindikasikan kebutuhan akan intervensi yang terkontekstualisasi dan multidimensional dalam merealisasikan SDGs Desa, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai elemen fundamental dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum dan sederhana, gender dimaknai sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kaitannya dengan pembangunan, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terlihat melalui mutu modal manusia (*human capital*). Pemaknaan ini dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang keduanya merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Berikut ini dijelaskan IPG Provinsi Bengkulu 2020-2022.

**Tabel 1. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Bengkulu 2020-2022**

No	Wilayah	IPG 2020-2022		
		2020	2021	2022
1	Provinsi Bengkulu	91.00	91.16	91.36
2	Bengkulu Selatan	94.14	94.31	94.72
3	Rejang Lebong	93.78	93.72	93.83
4	Bengkulu Utara	91.23	91.39	91.39
5	Kaur	87.12	87.17	87.51
6	Seluma	85.65	85.93	86.16
7	Mukomuko	83.88	84.03	84.22
8	Lebong	91.60	91.86	92.19
9	Kepahiang	95.80	95.73	96.11
10	Bengkulu Tengah	86.83	87.04	87.29
11	Kota Bengkulu	95.67	95.77	96.07

Sumber: <https://bengkulu.bps.go.id/indicator/40/155/1/indeks-pembangunan-gender.html>, akses 10 Februari 2024, pukul 19.30 WIB

Melihat data diatas, jika angka IPG semakin mendekati nilai 100, artinya semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki, namun bila semakin jauh angka IPG dari nilai 100, maka dapat diartikan semakin besar ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Hingga tahun 2022, kabupaten Kepahiang merupakan daerah yang nilai IPG-nya menggambarkan kondisi kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laknya baik, terlihat dengan nilai yang didapat 96,11. Berbeda dengan kabupaten Mukomuko yang nilai IPG-nya dapat dikatakan lebih kecil diantara kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Adapun konteks penelitian yang akan dilakukan di kabupaten Seluma, dapat dikatakan IPG-nya tidak menghasilkan nilai yang baik, karena berada pada nomor dua paling bawah diantara kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, dimana satu tingkat lebih baik dari kabupaten Mukomuko dengan nilai IPG 86,16.

Isu gender menjadi penting dalam memproyeksi pembangunan, hal ini karena semua yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia menjadi esensi utama atau subyek di dalam proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan di tingkat desa, peran perempuan menjadi sangat penting. Desa-desa sering kali menjadi unit dasar yang mewakili realitas kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar populasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu,

untuk mencapai SDGs secara efektif, penting untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan desa. Meskipun perempuan di desa sering kali menjadi tulang punggung ekonomi dan memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan sumber daya alam dan budaya, mereka juga sering menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang menghambat partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya.

Banyak penelitian sebelumnya yang telah menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa dan pencapaian SDGs. Misalnya, penelitian oleh (Tokan et al., 2020) yang menjelaskan bahwa pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan membutuhkan pelibatan perempuan secara aktif dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, namun relasi kuasa yang ada saat ini dan terbatasnya akses terhadap sumber daya menghambat partisipasi perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Dhar, 2018) bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dapat memajukan hak-hak perempuan, tetapi pemerintah harus melibatkan organisasi perempuan untuk pengembangan dan implementasi kebijakan. Kedua pendapat di atas diperkuat kembali dengan pendapat (Rifai et al., 2022) yaitu perencanaan dan penganggaran partisipatif dapat mendorong tata kelola desa yang inklusif dan memberdayakan kelompok perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan desa, dan pendapat (Chaurasia, 2019) yang menegaskan bahwa partisipasi perempuan yang kurang memuaskan dalam sistem produksi sosial dan ekonomi di tingkat desa, yaitu dipengaruhi oleh struktur kelas sosial, komposisi gender, pendidikan, tingkat kesuburan, dan jumlah penduduk.

Apabila melihat beberapa pendapat dan hasil penelitian terdahulu, maka tulisan ini memfokuskan pada capaian Desa Cahaya Negeri untuk memenuhi indikator SDGs Desa Nomor 5 dalam penetapan tipologi Desa Ramah Perempuan, yang mana hal ini di dasarkan pada sasaran berikut:

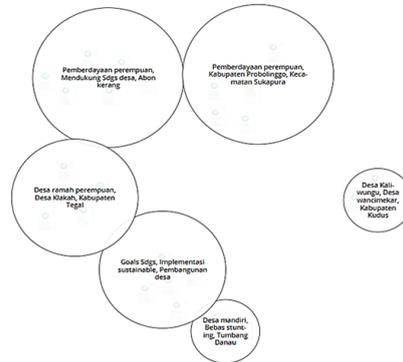
1. Adanya regulasi desa (Perdes/ SK Kades) yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%;
2. Terdapat regulasi desa (Perdes/ SK Kades) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan 0%
4. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas usia 18 tahun;
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan mencapai lulusan tingkat SMA/ SMK/ MA sederajat mencapai 100%
6. Persentase jumlah perempuan desa di kelembagaan desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa minimal 30%; dan
7. Persentase jumlah kehadiran perempuan dalam berpartisipasi menghadiri kegiatan Musyawarah Desa dan pelaksanaan pembangunan desa minimal 30%.

Tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan terkait akses perempuan dalam pembangunan desa yang didasarkan pada pencapaian SDGs Desa, khususnya pencapaian SDGs Desa nomor lima (5), yang diharapkan desa Cahaya Negeri dapat masuk kedalam tipologi Desa Ramah Perempuan.

## KAJIAN PUSTAKA

Melalui aplikasi *Open Knowledge Maps*, ditemukan 28 penelitian terdahulu yang paling relevan dengan kata kunci "Perempuan" dan "SDGs Desa" dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Artikel tersebut memiliki meta data yang mengelompokkan hasil penelitian ke dalam enam area penelitian yang relevan dengan konsep dimaksud.

Mewujudkan tipologi Desa Ramah Perempuan sejalan dengan Konsep SDGs Desa, untuk dapat memahami secara utuh, maka berikut penjelasan dan mapping penelitian terdahulu menurut hasil penelusuran pada aplikasi Open Knowledge Maps.



**Gambar 1. Hasil Pemetaan Topik Riset oleh *Open Knowledge Maps***

**Sumber:** Diakses melalui

<https://openknowledgemaps.org/map/30559e6ad97bcff8c330c9d813f53139>

*Mapping* yang disajikan oleh Open Knowledge Maps menghasilkan 5 lingkaran yang saling beririsan menandakan bahwa artikel memiliki keterkaitan, dan 1 lingkaran yang tidak beririsan dengan lingkaran lainnya. Namun dari lima lingkaran yang disebut dengan *Mapping Area* masih diidentifikasi kembali pada setiap artikel baik itu abstrak, rumusan masalah, metode, analisis hasil, dan hasil penelitian. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Analisa Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu**

<i>Mapping Area</i>	Jumlah Artikel	Relevansi	Keterangan
Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sukapura	6	5	5 (Lima) penelitian yang relevan di dasarkan karena kata kunci ( <i>keywords</i> ) yang sama pada masing-masing penelitian, yaitu keterlibatan perempuan atau kelompok perempuan di desa.
Pemberdayaan Perempuan, Mendukung SDGs Desa, Abon Kerang	6	3	3 (Tiga) penelitian dikatakan relevan karena terhubung dengan kata kunci ( <i>keywords</i> ) penelitian yang sama, yaitu keterlibatan perempuan dalam pencapaian SDGs Desa.
Desa Ramah Perempuan, Desa Klakah, Kabupaten Tegal	5	3	3 (Tiga) penelitian yang relevan di dasarkan atas kesamaan kata kunci ( <i>keywords</i> ) penelitian pada perempuan di desa dan keterlibatan perempuan dalam pencapaian SDGs Desa
<i>Goals SDGs, Implementasi Sustainable, Pembangunan Desa</i>	5	4	4 (Empat) penelitian dikatakan relevan, dikarenakan judul penelitian dan abstrak yang mengarah pada kata kunci ( <i>keywords</i> ) penelitian yang sama yaitu perempuan desa dan SDGs Desa.
Desa Mandiri, Bebas Stunting, Tumbang Danau	3	1	1 (Satu) penelitian yang relevan, karena abstrak penelitian menghasilkan kata kunci ( <i>keywords</i> ) penelitian pada program SDGs Desa.
Desa Kaliwungu, Desa Wancimekar, Kabupaten	3	0	<i>Area mapping</i> ini tidak menggambarkan kesamaan terkait fokus penelitian yang

<i>Mapping Area</i>	<b>Jumlah Artikel</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Keterangan</b>
Kudus			membahas keterlibatan perempuan dalam pencapaian SDGs Desa.

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan pendokumentasian yang didapat, maka didapatkan 16 artikel yang relevan di dasarkan pada kata kunci (*keywords*) penelitian yang sama, yaitu perempuan dan SDGs Desa. Namun adanya *research gap*, dimana kesemua penelitian tidak fokus mendetailkan keterlibatan perempuan dalam pencapaian SDGs Desa nomor 5, yaitu Tipologi Desa Ramah Perempuan.

Adapun *State of the Art* dalam penelitian ini mendefinisikan Desa Ramah Perempuan sebagai konsep yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan desa. Konsep ini berakar pada pengakuan bahwa perempuan sebagai setengah dari populasi desa yang memiliki kebutuhan dan kontribusi yang unik dan seringkali terabaikan dalam perencanaan pembangunan.

Tipologi Desa Ramah Perempuan merujuk pada karakteristik dan kondisi tertentu yang mendukung keterlibatan perempuan di desa. Program Desa Ramah Perempuan (Laily mufid, 2022), dibuat untuk memberikan perhatian khusus kepada perempuan sebagaimana yang tertuang di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau SDGs Desa, dimana tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini akan menjadi role model pembangunan desa.

Adapun tujuan untuk memahami dan memaknai kesetaraan gender, dijelaskan oleh (Riyanto et al., 2023) adalah dengan memilikinya tujuan dalam 1) menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan; 2) mengurangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; dan 3) menghapus seluruh praktik berbahaya, seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa, serta sunat kepada perempuan.

Untuk menjelaskan konteks gender ini, maka (Fakih, 1996) dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial memberikan pemahaman terkait gender, dimana harus mengetahui perbedaan antara seks (jenis kelamin) dan gender terlebih dahulu. Pengertian jenis kelamin sendiri merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti berikut: memiliki penis, memproduksi sperma. Sedangkan manusia berjenis perempuan adalah yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, memproduksi sel telur, memiliki vagina, mempunyai alat untuk menyusui.

Sehingga gender perlu dibedakan dengan pemahaman seks, hal ini dapat dilihat perbedaannya pada tabel berikut.

**Tabel 3. Perbedaan Seks dan Gender**

Seks	Gender
Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa, dimana saja tidak mengenal waktu dan tempat. Seperti akan selamanya laki-laki memiliki penis, dan perempuan memiliki rahim.	Bergantung pada waktu dan keadaan.
Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh kodrat Tuhan.	Peran sosial bukan kodrat manusia, tapi merupakan perbuatan manusia.
Peran reproduksi kesehatan telah ditentukan Tuhan, sehingga tidak dapat dipertukarkan yang menghasilkan konsekuensi melahirkan dan menyusui bagi perempuan	Menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat.

Sumber : (Mustakimah et al., 2023b)

Isu mengenai gender sangatlah seksi di dalam pembahasannya dan mendunia, dimana menempatkan perempuan pada posisi marginal dan subordinat, sehingga persoalan tentang ketidaksetaraan gender telah dibahas dari tahun 1948 melalui deklarasi Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh PBB, dan dilengkapi pada tahun 1976 menjadi *The International Bill Of Human right* (pernyataan hak asasi manusia).

Selanjutnya muncul sebuah paradigm *Women in Development* (WID) yang fokus terhadap pengintegrasian perempuan terhadap proses pembangunan. Namun terkendala akibat rendahnya kualifikasi perempuan untuk bisa mengisi posisi strategis terhadap proses pembangunan akibat dari tidak terlibatnya perempuan dalam dunia pendidikan, tidak memiliki keterampilan dan kurangnya kepercayaan diri perempuan. Secara konsep hal ini sejalan dengan pernyataan (Ilyas & S. M, 2020) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa partisipasi perempuan dalam pemberdayaan desa didorong oleh kesadaran, keinginan untuk belajar, kemampuan, akses untuk terlibat, dan dukungan keluarga. Namun, hal ini masih terhambat oleh beban kerja ganda, kurangnya rasa percaya diri, dan kurangnya modal usaha.

Konferensi perempuan ketiga di Nairobi Kenya pada tahun 1985, melahirkan perkembangan studi perempuan dengan paradigma *Gender And Development* (GAD) yaitu kajian yang menghubungkan perempuan dengan laki-laki, seperti terjadinya subordinasi terhadap perempuan merupakan akibat dari dominasinya laki-laki. Sehingga menempatkan hubungan laki-laki dan perempuan dengan merubah cara berpikirnya tentang persamaan, kesempatan, pilihan dan kesetaraan gender sebagai alat analisa dalam melihat ketimpangan antara keduanya, laki-laki dan perempuan.

Konferensi perempuan keempat di Beijing pada tahun 2000 melahirkan konsep pemberdayaan perempuan, hal ini merupakan n dari perjalanan panjang akan kesadaran umat manusia terhadap alam dan lingkungan sekitarnya terhadap pembangunan global. Dimana kerangka pembangunan baru perlu disusun dan dibentuk untuk mengakomodasi perubahan situasi dunia seperti isu kerusakan alam, eksploitasi sumberdaya alam, perubahan iklim, perubahan sosial dan pembangunan yang berpihak pada yang lemah dan miskin (Alfirdaus dalam Mustakimah et al., 2023).

Konsep SDGs tidak hanya diperuntukkan untuk Negara berkembang saja, namun secara global turut mendukung konsep SDGs dengan pembagian peran sesuai kapasitasnya. (Wahyuningsih, 2018) dalam tulisannya menguraikan butir-butir dari tujuan SDGs yang harus dilaksanakan oleh setiap Negara, yaitu 1) Tanpa kemiskinan; 2) Tanpa kelaparan dan mendorong pertanian berkelanjutan; 3) Kesehatan dan kesejahteraan yang baik bagi semua umur; 4) Pendidikan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas; 5) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan kaum ibu; 6) Air bersih dan sanitasi; 7) Energi bersih dan terjangkau; 8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; 9) Industri, inovasi dan infrastruktur yang berkelanjutan; 10) Mengurangi kesenjangan; 11) Keberlanjutan kota dan komunitas; 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) Aksi terhadap iklim; 14) Kehidupan bawah laut; 15) Kehidupan di darat; 16) Institusi peradilan; 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Ketujuh belas butir capaian SDGs diatas merupakan rangkaian proses panjang dan saling berkesinambungan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Blanc, 2015) yang menjelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan sistem yang lebih terintegrasi dibandingkan dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), sehingga berpotensi memfasilitasi integrasi kebijakan di berbagai sektor, namun masih diperlukan lebih banyak penelitian mengenai sistem biofisik, sosial, dan ekonomi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti.(Sholihah et al., 2024) Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara mendalam bersama informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik penelitian ini. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen relevan, seperti laporan, kebijakan, dan dokumen resmi lainnya.

Adapun proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (Bhattacharjee, 2019), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan makna-makna yang muncul dari data yang dikumpulkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai isu perempuan di dalam pembangunan desa yang berorientasi pada pencapaian SDGs Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### SDGs Desa: Konsep Baru Mengadopsi SDGs Melalui Aspek Lokalitas di Desa

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disahkan pada 25 September 2015, dengan menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini akan memandu pencapaian tujuan global hingga tahun 2030, dimana Indonesia sebagai negara bangsa turut berkomitmen dalam melaksanakan agenda SDGs. Komitmen ini tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals untuk tahun 2016-2030.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, Kementerian Desa PDTT melakukan pelokalan konsep SDGs global menjadi SDGs Desa. Pelokalan konsep SDGs menjadi SDGs Desa. (Iskandar, 2020) menegaskan SDGs Desa ke dalam pengertian lokal yang memungkinkan arah pembangunan desa menjadi lebih jelas, menggunakan diksi yang lebih sederhana, merujuk pada tujuan bukan proses, dengan dukungan data di level desa. Penggunaan data pada level desa sangat penting, mengingat selama ini, data survey nasional hanya bisa dibaca pada level kabupaten. Sementara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hanya melokalkan SDGs sampai level kabupaten.

Kementerian Desa PDTT telah merumuskan SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa tahun 2020-2024. Khusus untuk Pembangunan Desa, dengan dikeluarkannya Permendesa PDTT No. 21/ 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menurut peraturan ini, SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menurut Perpres Nomor 59 Tahun 2017 dan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020**

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	
	Perpres 59/ 2017	Permendesa No. 21/ 2020
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	Desa tanpa kemiskinan
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Desa tanpa kelaparan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan	Desa sehat dan sejahtera



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	
	Perpres 59/ 2017	Permendes No. 21/ 2020
	Meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Pendidikan desa berkualitas
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Keterlibatan perempuan desa
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua	Desa layak air bersih dan sanitasi
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Desa berenergi bersih dan terbarukan
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Pertumbuhan ekonomi desa merata
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Desa tanpa kesenjangan
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Desa tanggap perubahan iklim
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Desa peduli lingkungan laut
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman Hayati	Desa peduli lingkungan darat
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, Menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Desa damai berkeadilan
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan	Kemitraan untuk pembangunan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	
	Perpres 59/ 2017	Permendes No. 21/ 2020
	merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	desa
18		Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Sumber: (Najiyati et al., 2022)

Melalui Permendes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendes No. 21/ 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menghapus tujuan ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, dengan dasar untuk memperkuat upaya terpadu pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan desa agar percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud, dimana ke-17 tujuan SDGs Desa dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

### Profil SDGs Desa Cahaya Negeri: Keterlibatan Perempuan Desa

SDGs Desa merujuk pada pembangunan desa yang benar-benar berwujud pembangunan pada level desa, dimana tujuan nomor 5 di dalam SDGs Desa adalah keterlibatan perempuan desa, yang menargetkan pemerintah desa menjadi garda terdepan dalam pengarusutamaan gender, dengan dukungan dari berbagai pihak. Pada tahun 2030 ditargetkan untuk terciptanya kondisi yang menempatkan semua warga desa dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi terhadap perempuan di dalam segala aspek kehidupan.

Berdasarkan hal diatas, berikut disajikan data eksisting SDGs Desa Cahaya Negeri tahun 2022 mengenai rekomendasi program berdasarkan inputan data oleh desa.

**Tabel 5. Rekomendasi Program Berdasarkan Pendataan SDGs Desa**

No	Sasaran	Skor	Vol	Satuan	Rekomendasi Program	
					Musdes/RKPDes /RPJMDes	APBDes/ Siskeudes
5.1	Persentase keberadaan Perdes/ SK terkait gender	100	1	Peraturan	Perdes Pemberdayaan Perempuan	Bidang 3 pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan Pembinaan PKK
					Pelibatan aktif PKK dalam pembangunan desa	Bidang 3 pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan Pembinaan PKK
					Pengembangan Dasawisma PKK	Bidang 3 pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan

No	Sasaran	Skor	Vol	Satuan	Rekomendasi Program	
					Musdes/RKPDes /RPJMDes	APBDes/ Siskeudes
						Pembinaan PKK
					Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pemberdayaan	Bidang 3 pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan Pembinaan PKK
5.2	Persentase keberadaan Perdes/ SK terkait jaminan untuk perempuan	0	0	Peraturan	Perdes/ Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Bidang 3 pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan Pembinaan PKK
					Sosialisasi Perdes/ Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Bidang 3 pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan Pembinaan PKK
5.3	Prevalensi jumlah perkosaan, kejahatan asusila terhadap anak perempuan 0%	100	0	Kasus	Perdes tentang Kekerasan Terhadap Perempuan	Bidang 4 pada Sub Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga, dengan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
					Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan kekerasan terhadap perempuan dan	Bidang 4 pada Sub Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan

No	Sasaran	Skor	Vol	Satuan	Rekomendasi Program	
					Musdes/RKPDDes /RPJMDes	APBDes/ Siskeudes
					implikasi hukumnya	Keluarga, dengan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
					Sosialisasi tentang Hukum Kekerasan pada Perempuan	Bidang 4 pada Sub Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga, dengan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	0	0	Tahun	Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan	Bidang 4 pada Sub Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga, dengan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
					Pendewasaan usia kawin pertama	Bidang 4 pada Sub Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga, dengan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
					Pemberian kursus keterampilan pada remaja (putra maupun putri)	Bidang 4 pada Sub Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga, dengan kegiatan Pelatihan dan



No	Sasaran	Skor	Vol	Satuan	Rekomendasi Program	
					Musdes/RKPDes /RPJMDes	APBDes/ Siskeudes
						Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
					Sosialisasi tentang alat kontrasepsi pada orang telah menikah	Bidang 4 pada Sub Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga, dengan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
5.7	APK SMA mencapai 100%	0	0	Jiwa	Sosialisasi tentang Pentingnya Sekolah	Bidang 2 pada Sub Bidang Pendidikan, dengan kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Ma drasah Non Formal Milik Desa
					Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD di desa	Bidang 2 pada Sub Bidang Pendidikan, dengan kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Ma drasah Non Formal Milik Desa
					Pemberian beasiswa untuk masyarakat miskin	Bidang 2 pada Sub Bidang Pendidikan, dengan kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Ma drasah Non Formal Milik Desa



No	Sasaran	Skor	Vol	Satuan	Rekomendasi Program	
					Musdes/RKPDes /RPJMDes	APBDes/ Siskeudes
5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	0	0	Jiwa	Sosialisasi regulasi tentang BPD	Bidang 1 pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Musdes Lainnya, dan Penyusunan Kebijakan Desa
					Sosialisasi regulasi tentang Perangkat Desa	Bidang 1 pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Musdes Lainnya, dan Penyusunan Kebijakan Desa
5.9	Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%	100	2	Jiwa	Regulasi tentang kehadiran perempuan dalam Musdes dibuat minimal 30%	Bidang 1 pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Musdes Lainnya, dan Penyusunan Kebijakan Desa
					Regulasi tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dibuat minimal 30%	Bidang 1 pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan kegiatan Penyelenggara

No	Sasaran	Skor	Vol	Satuan	Rekomendasi Program	
					Musdes/RKPDes /RPJMDes	APBDes/ Siskeudes

Sumber: <https://sid.kemendesa.go.id/profile>, diakses pada 08 Juni 2024, pukul 14.30 WIB

Berdasarkan data rekomendasi hasil SDGs Desa, terdapat beberapa sasaran kunci yang menunjukkan tingkat kemajuan dan tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Desa Cahaya Negeri. Persentase keberadaan peraturan desa (Perdes) atau surat keputusan (SK) terkait gender mencapai 100%, mencerminkan adanya komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan perempuan. Program-program yang diusulkan mencakup pembinaan PKK, pengembangan Dasawisma PKK, dan peningkatan kapasitas perempuan, yang menunjukkan pendekatan holistik dalam memberdayakan perempuan di desa.

Namun, dalam hal peraturan yang menjamin perempuan mendapatkan pelayanan informasi dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, skor menunjukkan angka nol, menandakan belum adanya regulasi yang mendukung. Rekomendasi program mencakup sosialisasi Perdes/Kep. Kades untuk menjamin hak-hak perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi. Data juga menunjukkan tidak adanya laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, tetapi rekomendasi tetap menyarankan pembentukan Perdes tentang Kekerasan Terhadap Perempuan serta pelatihan dan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mencerminkan pendekatan proaktif untuk mengatasi potensi kekerasan.

Terkait median usia kawin pertama perempuan, skor nol menunjukkan bahwa usia kawin pertama masih terdapat yang berumur di bawah 18 tahun. Rekomendasi mencakup sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, pendewasaan usia kawin, pemberian kursus keterampilan untuk remaja, dan sosialisasi alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut dan pemberdayaan remaja perempuan dalam membuat keputusan terkait pernikahan dan kesehatan reproduksi.

Angka partisipasi kasar (APK) SMA juga menunjukkan skor nol, yang menandakan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan menengah di desa. Rekomendasi program seperti sosialisasi tentang pentingnya sekolah, pembangunan dan penyelenggaraan PAUD, serta pemberian beasiswa untuk masyarakat miskin diusulkan untuk meningkatkan akses pendidikan.

Selain itu, partisipasi perempuan di dalam kelembagaan desa/ pemerintahan desa, dapat dilihat melalui keterlibatan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa, yang masih sangat rendah, dengan skor nol. Upaya yang diusulkan meliputi sosialisasi regulasi tentang BPD dan perangkat desa untuk meningkatkan representasi perempuan dalam pemerintahan desa.

Namun, dalam hal kehadiran perempuan dalam musyawarah desa (Musdes) dan partisipasi dalam pembangunan desa, target minimal 30% telah tercapai, dengan skor 100%. Ini mencerminkan keberhasilan dalam melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa pencapaian penting, masih banyak area yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut untuk memastikan pemberdayaan perempuan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

### **Karakteristik Desa Ramah Perempuan di Desa Cahaya Negeri**

Identifikasi dan deskripsi karakteristik Desa Cahaya Negeri untuk mendukung konsep Desa Ramah Perempuan, maka hal ini dapat dilihat pada 1) kebijakan dan program pemerintah

desa; 2) partisipasi perempuan; 3) aksesibilitas perempuan; serta 4) keamanan dan perlindungan.

Adapun konteks serta substansi di dalam artikel ini lebih menekankan pada aspek kebijakan dan program pemerintah desa serta partisipasi perempuan, yang dianalisis berdasarkan wawancara dan telaah dokumen resmi untuk memberikan interpretasi dalam menguraikan tema Karakteristik Desa Ramah Perempuan di Desa Cahaya Negeri.

Kebijakan dan program pemerintah desa di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta memajukan pembangunan daerah. Berikut dapat dijelaskan ke dalam tabel yang menguraikan kebijakan dan program Desa Cahaya Negeri ke dalam kegiatan dan realisasi anggaran APBDes Tahun 2023.

**Tabel 6. Kegiatan dan Realisasi Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2023 di Desa Cahaya Negeri**

Jenis Kegiatan	Detail Kegiatan	Jumlah Anggaran Kegiatan	Realisasi Pemanfaat			Progress	Mendukung SDGs Desa Ke
			LK	PR	ARTM		
Saluran Drainase	Sapras	24.410.000	20	30	10	100%	3
Jalan Lingkungan Desa	Sapras	103.425.000	15	30	10	100%	9
Jembatan Gantung di Dusun 2	Sapras	85.159.000	60	40	10	100%	9
Pembuatan SPAL Dusun 1 dan 3	Sapras	193.163.000	30	50	0	100%	3
Pemeliharaan Batas Desa	Sapras	875.000	100	100	10	100%	11
Insentif Guru TPA	Non Sapras	43.000.000	0	12	0	100%	4
Kegiatan Posyandu Balita dan Lansia, Rembuk Stunting	Non Sapras	55.226.010	15	40	4	100%	3
Penanganan Keadaan Mendesak	Non Sapras	100.800.000	18	10	0	100%	1
Penyertaan Modal Desa	Non Sapras	10.000.000	0	0	0	0%	8
Operasional Kantor Desa	Non Sapras	24.255.840	10	5	0	100%	18
Sosialisasi Sadar Hukum	Non Sapras	62.664.150	30	30	0	100%	4
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Non Sapras	25.650.000	10	10	0	100%	18
Pengadaan Sarpras Posyandu	Non Sapras	3.900.000	0	20	0	100%	3
Perpanjangan Hosting web dan Pembayaran	Non Sapras	20.000.000	10	10	0	100%	4

Jenis Kegiatan	Detail Kegiatan	Jumlah Anggaran Kegiatan	Realisasi Pemanfaat			Progress	Mendukung SDGs Desa Ke
			LK	PR	ARTM		
Wifi , Belanja Modal							
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Non Saprass	4.000.000	12	3	0	100%	18
Pembelian Bibit Penggemukan Sapi	Non Saprass	52.000.000	2	0	0	100%	2

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2024

Pemerintah Desa Cahaya Negeri telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program melalui pengalokasian Dana Desa di dalam APBDes Tahun Anggaran 2023 yang berkontribusi dalam mewujudkan tipologi desa ramah perempuan. Data yang ada menunjukkan berbagai kegiatan yang tidak hanya menysasar pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Upaya ini terlihat jelas dalam berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, baik yang bersifat sarana dan prasarana (saprass) maupun kegiatan non-saprass.

Salah satu contoh yang mencolok adalah kegiatan posyandu balita dan lansia serta rembuk stunting dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.226.010. Kegiatan ini memanfaatkan 15 laki-laki, 40 perempuan, dan 4 Anggota Rumah Tangga Miskin (ARTM). Fokus utama dari kegiatan ini adalah kesehatan ibu dan anak, yang sangat relevan dalam konteks desa ramah perempuan. Dengan memberikan perhatian khusus pada kesehatan balita dan lansia, pemerintah desa memastikan bahwa perempuan yang biasanya bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan perawatan anggota keluarga yang lebih tua mendapatkan dukungan yang memadai. Kegiatan ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke-3, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan.

Selain itu, program insentif guru TPA dengan anggaran Rp43.000.000, yang memanfaatkan 12 perempuan, juga menunjukkan perhatian terhadap pendidikan anak-anak di desa. Pendidikan adalah salah satu elemen penting dalam pemberdayaan perempuan, dan melalui program ini, pemerintah desa berusaha meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, yang pada gilirannya dapat meringankan beban perempuan yang seringkali juga bertindak sebagai pendidik pertama bagi anak-anak mereka di rumah. Kegiatan ini mendukung SDGs Desa ke-4 tentang pendidikan berkualitas.

Pembangunan infrastruktur seperti saluran drainase, jalan lingkungan desa, dan jembatan gantung di Dusun 2 tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat secara umum tetapi juga berdampak langsung pada perempuan. Misalnya, dengan adanya saluran drainase yang baik dan jalan lingkungan yang memadai, perempuan dapat lebih mudah mengakses fasilitas umum seperti pasar, pusat kesehatan, dan sekolah. Hal ini juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan perempuan dalam beraktivitas sehari-hari. Pembuatan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di Dusun 1 dan 3 dengan anggaran Rp193.163.000, yang memanfaatkan 30 laki-laki dan 50 perempuan, sangat relevan dalam konteks sanitasi yang lebih baik. Sanitasi yang buruk seringkali berdampak lebih besar pada perempuan, terutama dalam hal kesehatan reproduksi dan beban kerja tambahan yang mereka hadapi dalam mengelola air bersih dan sanitasi rumah tangga.

Kegiatan non-saprass lainnya seperti sosialisasi sadar hukum dengan anggaran Rp62.664.150, yang memanfaatkan 30 laki-laki dan 30 perempuan, juga sangat penting dalam konteks desa ramah perempuan. Melalui sosialisasi ini, perempuan diberikan pengetahuan dan

pemahaman mengenai hak-hak mereka, termasuk hak atas perlindungan hukum dan keadilan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perempuan dan memastikan mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi desa. Kegiatan ini mendukung SDGs Desa ke-4 tentang pendidikan berkualitas.

Program pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar dengan anggaran Rp25.650.000, yang memanfaatkan 10 laki-laki dan 10 perempuan, juga menunjukkan perhatian pemerintah desa terhadap pengembangan potensi perempuan. Sanggar seni dan belajar dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang ekonomi dan pemberdayaan mereka. Kegiatan ini mendukung SDGs Desa ke-18 tentang lembaga desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Namun, ada beberapa program yang belum terealisasi seperti penyertaan modal desa dengan anggaran Rp10.000.000. Penyertaan modal desa yang efektif dapat membuka peluang usaha bagi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan finansial. Program ini seharusnya didorong lebih lanjut untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi.

Operasional kantor desa dengan anggaran Rp24.255.840 dan penyelenggaraan informasi publik desa dengan anggaran Rp4.000.000 menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang terbuka dan partisipatif, perempuan dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan desa.

Pengadaan sarpras posyandu dengan anggaran Rp3.900.000 dan perpanjangan hosting web serta pembayaran wifi dengan anggaran Rp20.000.000, menunjukkan langkah pemerintah desa dalam meningkatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan bagi perempuan. Informasi yang mudah diakses dan pelayanan kesehatan yang memadai adalah kunci dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan perempuan.

Secara keseluruhan, kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Cahaya Negeri melalui APBDes Tahun Anggaran 2023 menunjukkan upaya yang signifikan dalam mewujudkan tipologi desa ramah perempuan. Dengan memperhatikan kebutuhan dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, desa ini bergerak menuju terciptanya lingkungan yang mendukung kesejahteraan, keamanan, dan pemberdayaan perempuan. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua program berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi perempuan di Desa Cahaya Negeri.

**Tabel 7. Gambaran Kepesertaan Warga dalam Musyawarah Desa Perencanaan Tahun 2022 di Desa Cahaya Negeri**

ID Desa	Nama	Jenis Kelamin	Unsur	Gagasan/usulan
1705012029	Vera Utami Herawati	Perempuan	BPD	Mengajukan Pelapis Tebing Sungai
1705012029	Riri Andriani	Perempuan	Bumdes	Mengajukan Penambahan Modal BUMDES
1705012029	yusrizal	Laki-laki	perangkat	Pembangunan gedung Paut

ID Desa	Nama	Jenis Kelamin	Unsur	Gagasan/usulan
1705012029	Nanda Niken P	Perempuan	bidan desa	Makanan tambahan lansia, alat timbangan, meja untuk kader posyandu
1705012029	Filma Yulis	Perempuan	PKK	Mengajukan Kios Kuliner, serta bahan-bahan kue
1705012029	Khairuddin	Laki-laki	kepala dusun 3	Mengajukan siring Galian 200 M didusun 1
1705012029	suprianto	Laki-laki	kepala dusun 3	Mengajukan Siring Galian 100 M Didusun 3
1705012029	Amirzan	Laki-laki	Ketua BPD	Rumah RTLH
1705012029	Feppi sulastri	Perempuan	Kader PKM	Mengajukan Kelengkapan alat Tulis
1705012029	Hero Kurniawan	Laki-laki	Ketua pemuda	Mengajukan Dana Kepemudaan

Sumber : Data IDM Tahun 2023

Data musyawarah desa tahun 2022/2023 yang dilaksanakan dalam memenuhi proses pembangunan di desa, dengan melalui tahapan perencanaan, dimana partisipasi yang baik dari perempuan tergambar dengan kehadiran mereka dalam memberikan gagasan pembangunan untuk Desa Cahaya Negeri. Seperti, Vera Utami Herawati dari BPD mengusulkan pelapis tebing sungai, sementara Riri Andriani dari Bumdes mengajukan penambahan modal BUMDES. Usulan lainnya datang dari Yusrizal yang merupakan perangkat desa yang mengusulkan pembangunan gedung PAUD. Nanda Niken P, bidan desa, mengusulkan makanan tambahan untuk lansia serta alat timbangan dan meja untuk kader posyandu. Filma Yulis dari PKK mengajukan kios kuliner serta bahan-bahan kue.

Jika diperhatikan melalui data kehadiran, pelaksanaan musyawarah desa ini telah memenuhi unsur perempuan sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan peserta musyawarah desa (laki-laki maupun perempuan). Partisipasi yang cukup baik ini menunjukkan bahwa perempuan di Desa Cahaya Negeri memiliki peran di dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa.

Analisis ini menunjukkan keberagaman gagasan dan kebutuhan masyarakat desa yang mencakup aspek infrastruktur, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Partisipasi yang inklusif ini mencerminkan semangat kolaboratif dalam upaya membangun desa yang lebih baik dan lebih sejahtera.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan tipologi Desa Ramah Perempuan melalui pemenuhan indikator SDGs Desa Nomor 5 di Desa Cahaya Negeri. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung pemberdayaan perempuan, partisipasi aktif perempuan dalam proses pembangunan masih terbatas. Faktor-faktor yang menghambat termasuk struktur sosial dan hambatan akses terhadap sumber daya serta kesempatan pendidikan.

Desa Cahaya Negeri masih menghadapi tantangan dalam memenuhi indikator-indikator SDGs nomor 5, seperti rendahnya partisipasi perempuan di dalam kelembagaan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan rendahnya angka partisipasi kasar (APK) perempuan dalam pendidikan tingkat SMA/SMK/MA. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya potensi besar untuk meningkatkan keterlibatan perempuan melalui peraturan desa yang lebih responsif gender dan program-program pemberdayaan yang lebih inklusif.

Saran untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di Desa Cahaya Negeri meliputi peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan, penguatan kapasitas perempuan dalam perencanaan dan penganggaran desa, serta promosi regulasi desa yang lebih responsif gender. Selain itu, penting untuk mengadakan kampanye kesadaran tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan di tingkat desa. Dengan langkah-langkah ini, Desa Cahaya Negeri diharapkan dapat mencapai tipologi Desa Ramah Perempuan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M. (2022). Realizing a Village Without Poverty: The Challenges of Implementing the Village SDGs Policy in Indragiri Hilir Regency, Riau Province. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10570>
- Bhattacharjee, A. (2019). *Social Science Research: principles, methods, and practices* (Revised ed). University of South Florida.
- Blanc, D. (2015). Towards Integration at Last?: The Sustainable Development Goals as a Network of Targets. *Sustainable Development*, 23, 176–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/SD.1582>.
- Chaurasia, A. (2019). Female Work Participation in Villages. *Population and Sustainable Development in India*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-32-9212-3\\_10](https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-32-9212-3_10)
- Dhar, S. (2018). Gender and Sustainable Development Goals (SDGs). *Indian Journal of Gender Studies*, 25, 47–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0971521517738451>
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Ilyas, S., & S. M, M. (2020). Pemberdayaan Perempuan melalui Dana Desa di Desa Tammejarra Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. 1, 15–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/PRD.V1i1.14985>
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Ed. I). Obor.
- Laily mufid, F. (2022). Mewujudkan Model Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai Upaya Mencegah Pekerja Anak di Sektor Pertanian. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1(1), 107–122. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i1.1552>
- Mashur, D. (2022). Synergy of Institutional Partnerships in Realizing Village SDGs Through Utilization of Mangrove Fruits for Coffee. *Journal of Community Service Public Affairs*, 2(4), 122–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.46730/jcspa.v2i4.51>
- Mustakimah, L., Huriani, Y., & Zulaeha, E. (2023a). Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Kesetaraan Gender pada Masyarakat Desa. *Az-Zahra*, 4(1), 12–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/azzahra.v4i1.25462>
- Mustakimah, L., Huriani, Y., & Zulaeha, E. (2023b). Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Kesetaraan Gender pada Masyarakat Desa. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 12–29. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v4i1.25462>
- Najiyati, S., Haryati, Pandiadi, Danarti, Wijayansih, W., Siswoyo, Suharyati, A., Kartika, N., & Cesaria, O. D. (2022). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Berbasis SDGs Desa* (Cetakan Pe). Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rifai, R., Taufiq, M., Hidayat, R., & Sauki, M. (2022). Citizen Forum on Participatory Planning and Budgeting to Promote the Inclusive Village Governance. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/ja.v6i1.16845>
- Riyanto, C. S., Fadila, N. I., Miladyah, I., Avisya, C., Irianti, B. C., & Radianto, D. O. (2023). Kesetaraan Gender. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(8), 1767–1773.
- Sholihah, H. A., Yumna, A. N. A., & Isnaini, S. N. (2024). KAJIAN EKOFEMINISME: STUDI KASUS KOMUNITAS PEREMPUAN PEDULI LEUSER. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*,



- 19(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.23806>
- Subekti, A. (2024). The Analysis of Village Fund Contribution to Achieve a National Sustainable Development Goal (SDGs Village) in Gadingrejo Village, Kepil Subdistrict Wonosobo Regency. *International Journal of Social Science*, 1(5), 739–746. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1318>
- Tokan, F., Gai, A., & Negong, Y. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Development Goals (Mdgs) dan Sustainable Development Goals (Sdgs) dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma*, 11((3)), 390. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>
- Yefni, Rosmita, Lubis, R., & Yusuf, A. (2024). The Implementation of The Village SDGS Program: Factors and Importance Performance Analysis. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 13(1), 30–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.22202/mamangan.v13i1.7705>